

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam menilai kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran memainkan peran penting. Tingginya tingkat pengangguran di suatu negara akan berdampak buruk bagi perekonomian, individu, dan masyarakat. Hal ini akan menghambat masyarakat untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya, menurunkan produktivitas serta pendapatan masyarakat yang dapat berujung pada kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Apabila tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, maka dengan tingginya jumlah angkatan kerja akibat seiring bertambahnya penduduk akan dapat meningkatkan pengangguran (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Secara umum, definisi pengangguran menurut BPS adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak aktif mencari pekerjaan karena berpendapat tidak memungkinkan memperoleh pekerjaan, atau tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Menurut Keynes, pengangguran terjadi karena permintaan agregat yang rendah dimana saat rendahnya permintaan agregat, hal itu dapat menurunkan produksi sehingga kondisi ini dapat menekan permintaan di pasar tenaga kerja. Keynes menganjurkan intervensi pemerintah untuk menjaga tingkat permintaan agregat (Ricky & Rizky, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dimana jumlah penduduknya terus bertambah, sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari masalah pengangguran. Dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, mengartikan bahwa kebijakan serta strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di beberapa wilayah dianggap belum optimal terutama di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki TPT cukup tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021

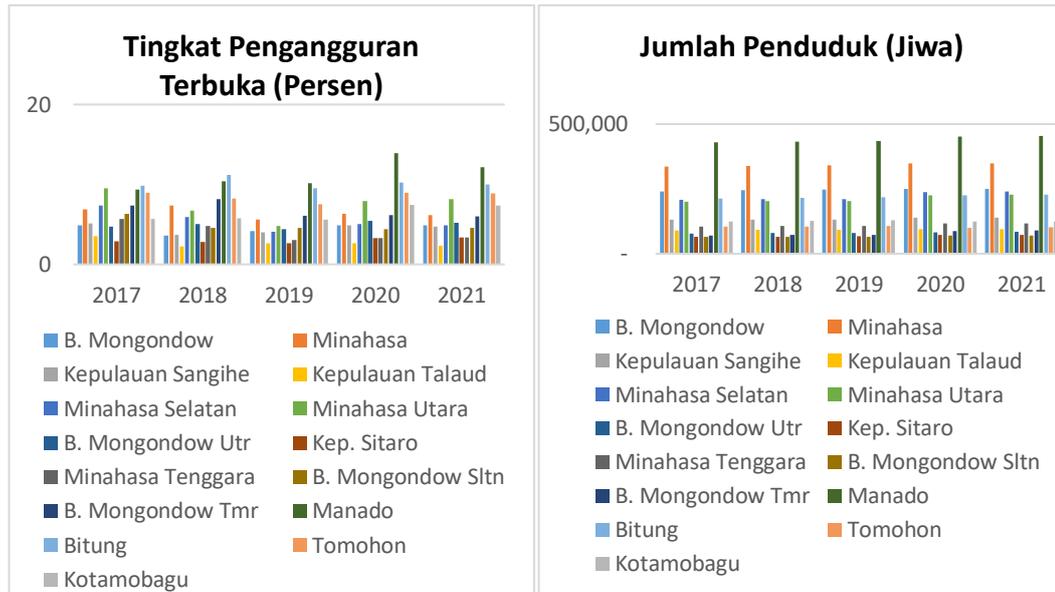
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mencapai 7,06% pada tahun 2021, bahkan angka tersebut selalu lebih tinggi daripada angka pengangguran di tingkat nasional dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan TPT yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu mencapai 7,37% dimana hal tersebut disebabkan oleh dampak langsung dari pandemi *covid-19* terhadap para pekerja di daerah Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPb Prov. Sulut, 2020).

Selama 5 tahun terakhir TPT Provinsi Sulawesi Utara menjadi yang tertinggi di Pulau Sulawesi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dan menempati urutan ke-enam tertinggi di Indonesia sehingga mengartikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang memiliki angka TPT tinggi di Indonesia; meskipun angkanya mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021, namun; angka tersebut juga belum selalu mencapai target TPT yang telah ditetapkan Pemrov Sulawesi Utara dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (BKAD Sulut, 2020). Hal tersebut menggambarkan tidak adanya konsistensi untuk mengurangi TPT di Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi TPT di setiap kabupaten dan kota-nya juga menunjukkan angka yang bervariasi dengan hampir separuhnya di atas rata-rata tingkat

pengangguran Provinsi dengan TPT yang tertinggi yaitu Kota Manado dan terendah berada di Kepulauan Talaud (BPS, 2021).

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai beragam potensi diberbagai sektor terutama sektor perikanan dan sektor pariwisata yang sangat besar dengan kekayaan sumber daya yang dimilikinya dimana pesona wisata bahari, ecotourism, dan wisata budaya yang ditawarkannya menjadikannya sebagai salah satu target nasional destinasi pariwisata superprioritas dan unggulan Indonesia (Kanwil DJPb Prov. Sulut, 2021). Hal tersebut dapat memberikan peluang bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja untuk masyarakat sehingga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan TPT sehingga atas dasar tersebut menjadikan alasan peneliti untuk memilih Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek penelitian.

Menurut Malthus bertumbuhnya jumlah penduduk akan lebih cepat daripada tumbuhnya kesempatan kerja, sehingga menciptakan tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran (Sembiring & Sasongko, 2019). Jumlah penduduk akan mempengaruhi TPT dimana dengan bertambahnya jumlah penduduk disetiap tahunnya, hal ini akan menyebabkan bertambahnya juga pertambahan angkatan kerjanya sehingga setiap bertambahnya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam lapangan kerja maka menyebabkan pengangguran. Perkembangan jumlah penduduk antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021 cenderung meningkat setiap tahunnya meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak selalu berdampak terhadap meningkatnya TPT.



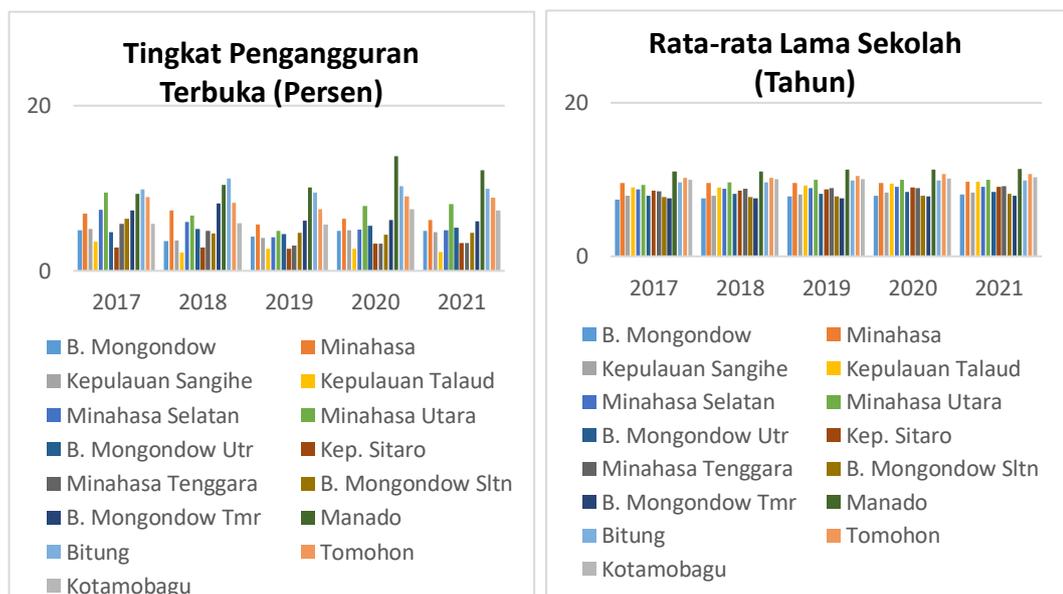
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, 2022

Gambar 2. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) dan Jumlah Penduduk (Jiwa) Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Dari gambar 2 dapat dilihat ketika jumlah penduduk Kota Manado naik pada tahun 2019 dan 2021, masing-masing sebesar 0,41% dan 0,28%; namun, TPT mengalami penurunan masing-masing mencapai 0,26% dan 1,71%. Pada tahun 2019 dan 2021 ketika jumlah penduduk Kota Bitung naik masing-masing sebesar 1,53% dan 0,91%; namun, TPT mengalami penurunan masing-masing mencapai 1,72% dan 0,27%. Adapun di Kota Tomohon terjadi pada tahun 2018, 2019, dan 2021 ketika jumlah penduduk naik masing-masing sebesar 1,54%, 1,53%, dan 0,26%; namun, TPT mengalami penurunan masing-masing mencapai 0,72%, 0,74%, dan 0,15%; sementara pada tahun 2020 ketika jumlah penduduk menurun sebesar 5,92%, namun TPT mengalami kenaikan sebesar 1,51%. Pada tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Minahasa Utara ketika jumlah penduduk naik masing-masing sebesar 0,66% dan 0,65%; namun, TPT mengalami penurunan masing-masing mencapai 2,76% dan 1,88%; sementara di Kabupaten Boolang Mangondow Timur pada tahun 2019 dan 2021 ketika jumlah penduduk naik masing-masing sebesar 1,30% dan 1,98%; namun, TPT mengalami penurunan masing-masing mencapai 2,11% dan 0,14%. Fenomena tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori Malthusian yang mengatakan pengangguran akan

meningkat apabila jumlah penduduk pada suatu daerah tersebut mengalami kenaikan.

Teori Human Capital Becker menyatakan peningkatan capaian pendidikan dapat mengindikasikan modal manusia yang dimiliki semakin tinggi. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan maka diharapkan akan meningkatkan produktivitas serta tingkat pengembalian investasi dalam pendidikan (Hasibuan & Hadayani, 2021). Pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap TPT dimana semakin lama seseorang mengenyam pendidikan formal, akan meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk bekerja sehingga bisa menurunkan TPT. Pendidikan dapat diproksi dengan rata-rata lama sekolah yang merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas untuk mengenyam semua jenis pendidikan yang pernah di jalani. Perkembangan rata-rata lama sekolah antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2017-2021, selalu mengalami kenaikan setiap tahun, meskipun demikian kenaikan tersebut masih belum sepenuhnya mempengaruhi penurunan TPT.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, 2022

Gambar 3. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Dari gambar 3 dapat dilihat ketika RLS di Kota Manado pada tahun 2018 dan 2020 meningkat masing-masing menjadi 11,04 tahun dan 11,27 tahun; namun, TPT ikut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,03% dan 3,76%. Pada tahun

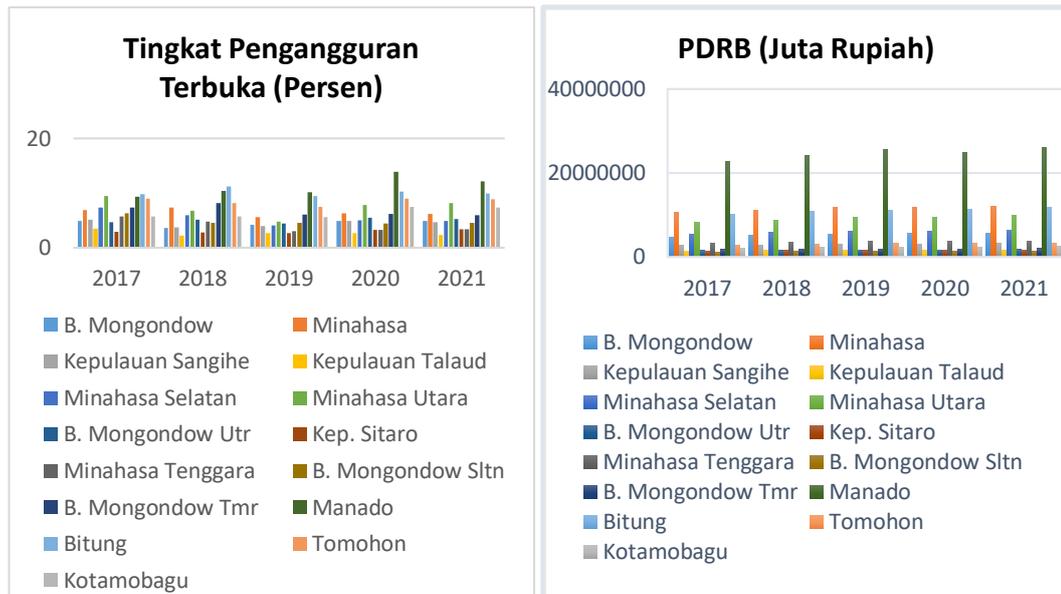
Septia Tri Wahyuni, 2023

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SELURUH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2018 dan 2020 ketika RLS di Kota Bitung naik masing-masing menjadi 9,65 tahun dan 9,88 tahun; namun, TPT ikut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,03% dan 3,76%. Pada tahun 2020 ketika RLS di Kota Tomohon naik menjadi 10,73 tahun; namun, TPT ikut mengalami peningkatan sebesar 1,51 %. Adapun di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2020 dan 2021 RLS naik masing-masing menjadi 9,99 tahun dan 10 tahun; namun, TPT ikut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,04% dan 0,24%; sementara pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2018 dan 2020 RLS naik masing-masing menjadi 7,57 tahun dan 7,83 tahun; namun, TPT ikut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,86% dan 0,06%. Pada tahun 2018 dan 2020 ketika RLS di Kabupaten Minahasa naik masing-masing menjadi 9,56 tahun dan 9,59 tahun; namun, TPT ikut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,44% dan 0,72%. Fenomena ini menandakan ketidaksesuaian dengan teori Human Capital Becker yang menyatakan peningkatan capaian pendidikan bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat memberikan peluang kerja yang lebih besar dan peningkatan penghasilan sehingga seharusnya dapat menurunkan TPT.

PDRB yang tinggi menggambarkan pertumbuhan riil dari produk barang/jasa yang diproduksi disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB memiliki kaitan negatif terhadap pengangguran dimana dijelaskan pada hukum okun yang menerangkan bahwa ketika PDRB disuatu daerah mengalami peningkatan, hal itu akan menyebabkan peningkatan pada penyerapan tenaga kerjanya di daerah tersebut sehingga dapat mengurangi pengangguran (Nujum, Rahman, & Purnama, 2020). PDRB juga berpengaruh terhadap TPT, selain jumlah penduduk dan rata-rata lama sekolah dimana apabila PDRB naik maka TPT akan turun. Perkembangan PDRB antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021 cenderung meningkat, meski demikian peningkatan PDRB tidak selalu menurunkan TPT.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, 2022

Gambar 4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) dan Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Dari gambar 4 dapat dilihat ketika terjadi peningkatan PDRB di Kota Manado pada tahun 2018 menjadi 24126539,48 juta; namun TPT nya ikut meningkat sebesar 1,03%. Pada tahun 2018 dan 2020 ketika PDRB Kota Bitung meningkat masing-masing menjadi 10735834,24 juta dan 11325095,84 juta; namun TPT nya juga meningkat masing-masing sebesar 1,36% dan 0,74%. Pada tahun 2021 ketika PDRB Kabupaten Minahasa Utara meningkat menjadi 9884318,04 juta; namun TPT nya juga meningkat sebesar 0,24%, sementara di Kabupaten Boolang Mangondow Timur ketika pada tahun 2018 dan 2020 PDRB meningkat menjadi 1792386,87 juta dan 1881482,35 juta; namun TPT nya juga meningkat masing-masing sebesar 0,86% dan 0,06%. Adapun di Kabupaten Minahasa tahun 2018 ketika PDRB meningkat menjadi 11159065,35 juta; namun TPT nya juga meningkat sebesar 0,44%. Pada tahun 2018 dan 2020 ketika PDRB Kota Kotamobagu meningkat masing-masing menjadi 2254152,5 juta dan 2397215,4 juta; namun TPT nya juga meningkat masing-masing sebesar 0,02% dan 1,82%. Fenomena tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum Okun dimana terdapat hubungan atau kaitan yang negative antara TPT dengan PDRB dimana

peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga menurunkan TPT.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pengaruhnya jumlah penduduk, RLS, dan PDRB terhadap TPT, sebagaimana dilakukan oleh Edo P dan Eko C (2021) menyatakan Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap TPT. Penelitian oleh Fajar R.S dan Eni S (2022) menyatakan pendidikan dan PDRB berpengaruh negatif signifikan sementara variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap TPT. Penelitian oleh Teresa V. Tumilaar, dkk (2022) menyatakan variabel pendidikan berpengaruh positif signifikan sementara jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT. Penelitian oleh Satrio P dan Nunuk Triwahyuningtyas (2022) menyatakan Pendidikan berpengaruh negatif signifikan sementara PDB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran sehingga atas penjelasan diatas membuat terdorongnya peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara”**.

I. 2 Perumusan Masalah

TPT menjadi masalah terpenting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki TPT cukup tinggi selama lima tahun terakhir bahkan, selalu diatas tingkat pengangguran nasional dimana menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Pulau Sulawesi dan menempati urutan ke-6 tertinggi di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi bisa berdampak negatif pada perekonomian negara. Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?

I. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Septia Tri Wahyuni, 2023

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SELURUH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

I. 4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus ekonomi pembangunan untuk memperkaya penelitian yang sudah ada dan diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan pada penelitian yang akan datang dalam mengimplementasikan teori.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Berharap penelitian ini mampu menambah pengetahuan serta wawasan mengenai faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti mendatang.

b) Bagi Pemerintah

Berharap penelitian ini mampu menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk menuntaskan permasalahan tingkat pengangguran terbuka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.